

Masalah Distribusi Bansos di Tengah Pandemi Covid-19

JARINGAN PEMANTAUAN PENANGANAN COVID-19
INDONESIA CORRUPTION WATCH
3 SEPTEMBER 2020

Pemantauan Distribusi Bansos



- Pemantauan dilakukan sejak 2 Juni 2020
- Daerah pemantauan:
 - Aceh
 - Medan
 - Palembang
 - DKI Jakarta
 - Semarang
 - DI Yogyakarta
 - Bali
 - Manado
 - Makassar
 - Kendari
- Laporan dari warga berasal dari lebih banyak daerah, misalnya Kuningan, Sumenep, Jambi, Konawe Selatan, Minahasa, Minahasa Utara, dll.



Pemantauan

- Fokus pemantauan yaitu terkait penyaluran bansos dan dugaan penyalahgunaan, seperti pemotongan/ pungli, politisasi, pemberian yang tidak sesuai ketentuan, bantuan ganda, tidak tepat sasaran (khususnya inclusion error), bansos tidak disalurkan, dan lainnya.
- Dilakukan dengan:
 - Penelusuran online
 - Membuka posko pengaduan (whats app, website, email, SMS, dll)
 - Pengumpulan informasi (permohonan informasi, audiensi, wawancara)
 - Tindak lanjut temuan:
 - Klarifikasi
 - Pelaporan

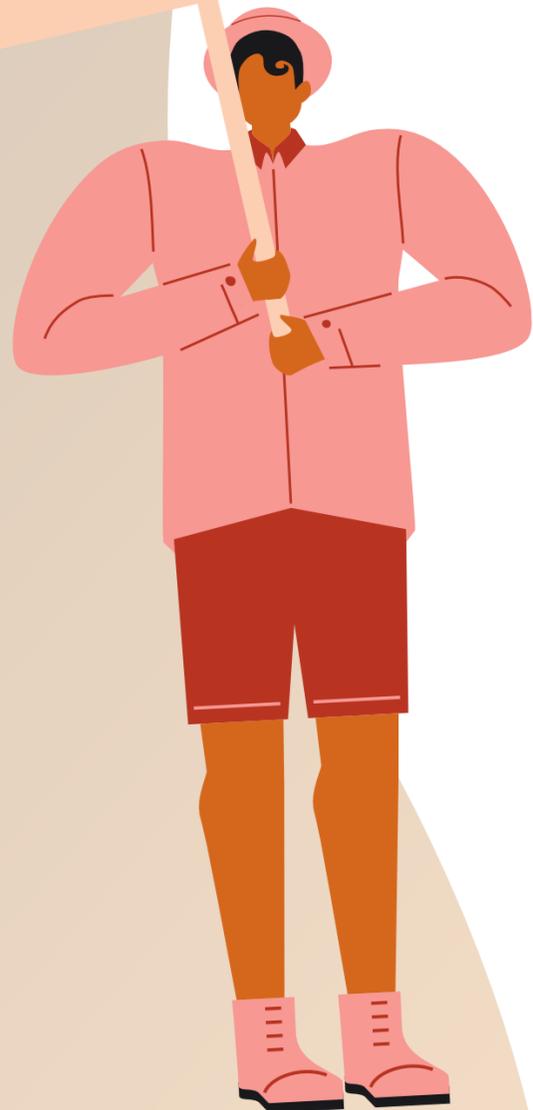
Tujuan Pemantauan

- Memotret masalah penyaluran bansos
- Menindaklanjuti keluhan warga terkait bansos
- Menyampaikan catatan atau temuan pemantau kepada pengambil kebijakan dan pelaksana distribusi bansos sebagai bahan masukan dan rekomendasi pembenahan.

Mitra Pemantauan

- Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
- Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDaR) Medan
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Palembang
- IDEA Yogyakarta
- PATTIRO Semarang
- Yayasan Mitra
- Bangsa (YASMIB) Sulawesi
- Pusat Studi Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PuspaHAM) Kendari
- Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM)
- Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH)
- Balebengong Bali

239 Temuan dan Aduan Warga



- 96 temuan (masalah dan dugaan penyalahgunaan)
- 143 aduan warga
 - 98 masalah dan dugaan penyalahgunaan
 - 45 non penyalahgunaan
 - Bersifat pertanyaan umum mengenai penyaluran bansos.
 - Keluhan bahwa warga merupakan pihak yang terdampak Covid-19 dan membutuhkan bantuan dari pemerintah, namun tidak mendapat bantuan.
 - Keluhan bahwa bansos yang diterima tidak cukup membantu.
 - Dll.

Jenis Masalah yang Ditemukan/ Diadukan Warga



No.	Jenis	Jumlah	%
1	Pemotongan/ pungli	46	19,25%
2	Inclusion error	43	17,99%
3	Bantuan tidak diterima warga	23	9,62%
4	Bantuan ganda	21	8,79%
5	Penyaluran bantuan terlambat	11	4,60%
6	Politisasi	9	3,77%
7	Sembako tidak layak	2	0,84%
8	Masalah/ penyalahgunaan lainnya	39	16,32%
9	Non penyalahgunaan	45	18,83%
Jumlah		239	100,00%

Jenis Bansos

No.	Jenis Bansos	Jumlah	%
1	Bansos dari Pemprov	36	20,00%
2	BLT DD	34	18,89%
3	BST Kemensos	31	17,22%
4	Tidak diketahui	33	18,33%
5	Bansos dari Pemkab/kot	23	12,78%
6	Kartu sembako & banpres	18	10,00%
7	PKH	5	2,78%
Jumlah		180	100,00%

Tindak Lanjut Temuan & Aduan Warga

Klarifikasi	63
Pelaporan ke SP4N LAPOR!	47
Pelaporan ke Dinsos	22
Pelaporan ke JAGA Bansos	5
Pelaporan ke Kemensos	3
Jumlah	140

Masalah Lain

- Masalah pendataan.

Pendataan penerima bansos diketahui tidak valid dan mutakhir. Akibatnya, bermunculan kasus inclusion dan exclusion error serta ketidaksinkronan antara data pemerintah daerah dengan data RT. Padahal, DTKS seharusnya diperbarui secara berkala setidaknya satu tahun sekali oleh pemkab/ pemkot dan diverifikasi serta divalidasi oleh pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial.

- Masalah keterbukaan informasi anggaran, pengadaan bansos sembako, jenis/ program bansos daerah, dan penyaluran bansos.

Data terkait bansos ini tidak serta merta dipublikasikan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di daerah, tim pemantau bahkan mengirimkan surat permohonan informasi, sengketa informasi, dan audiensi, namun respon pihak Dinas Sosial tergolong sangat lambat dan tidak informatif.

Catatan Lain

- Warga banyak belum mengetahui bagaimana cara mengecek kepesertaan bansos di website Kemensos (SIKS-NG)
- Warga banyak belum mengetahui kanal pengaduan bansos (Hasil survey ICW di Kupang, 0% responden yang merupakan penyandang disabilitas mengetahui aplikasi LAPOR! dan JAGA BANSOS KPK).
- Ada kekhawatiran dari warga bahwa apabila mereka melapor atau mempertanyakan bansos, maka mereka tidak akan menerima bansos.
- Informasi mengenai distribusi dan penerima bansos sulit didapatkan oleh pemantau.

Rekomendasi

- Jangka panjang, Kemensos bekerjasama dengan Kemendagri menyelesaikan masalah kedisiplinan pemda untuk memperbaiki, memvalidasi, dan memverifikasi DTKS.
- Kemensos dan Pemda segera membenahi DTKS.
- Kemensos, pemda, dan pemerintah desa harus transparan membuka informasi rincian anggaran bansos, pengadaan barang untuk bansos, jenis dan jumlah bansos, penerima bansos, serta realisasi anggaran penyaluran bansos.
- SP4N LAPOR dan Ombudsman RI turut mengusulkan pembenahan distribusi bansos kepada instansi terkait, tidak hanya menerima dan menindaklanjuti laporan warga.